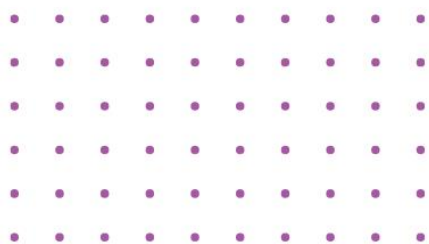
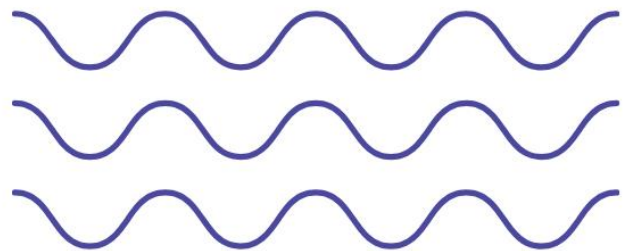




LAPORAN KINERJA

**Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna
Tahun 2024**



<https://bp3d.natunakab.go.id/>



RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. Maka dari itu, LKj adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 juga bertujuan sebagai:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas; dan
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (Penja) dan semua program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam empat Indikator Kinerja Sasaran yang mengukur keberhasilan dari empat Sasaran Strategis, dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai LAKIP	Nilai	80,00	78,70	98,37
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,48	3,32	95,40
3	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	7,9	7,8	98,73
4	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,9155	3,34	114,56
Nilai rata-rata capaian kinerja					101,76

Sebagai mana terlihat pada table diatas, pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 di peroleh hasil rata-rata capaian 101,76% kategori AA

(sangat memuaskan). Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna beserta dukungan segenap pejabat dan staf/pegawai dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, disamping terjalin koordinasi, sinkronisasi baik dengan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Pusat.

Adapun Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dapat dijelaskan dari jumlah belanja langsung sebesar Rp 15.128.049.162,00 yang dialokasikan untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran, dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 11.083.445.402 atau 73,26%, sedangkan realisasi akuntabilitas kinerja sebesar 101,76%. Efisiensi penggunaan sumber daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 sebesar 28,50%. Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang mendukung Indikator Sasaran.

Ranai, 17 Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna


MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr, Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah disampaikan dalam rangka memenuhi :

1. Peraturan Presiden No 29 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selama tahun 2024, sebagai konsistensi atas komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban, Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam bagian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Laporan Kinerja juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah masa mendatang.

Kami menyadari bahwa Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Demikianlah laporan ini di sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dimasa yang akan datang.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Ranai, 17 Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Gambaran Umum	3
1.5. Sistematika Penyusunan.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis.....	8
2.1.1. Visi dan Misi.....	9
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	11
2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.2. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan.....	24
3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran.....	26
3.1.3 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	35
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	51
3.1.5 Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	52
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	53
3.2. Realisasi Anggaran.....	54
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	57

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	11
Tabel II.2	: Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	12
Tabel II.3	: Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	13
Tabel II.4	: Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	14
Tabel II.5	: Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2024.....	15
Tabel III.1	: Skala Penilaian	24
Tabel III.2	: Capaian Kinerja Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	24
Tabel III.3	: Perbandingan Capaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024.....	25
Tabel III.4	: Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra.....	26
Tabel III.5	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	27
Tabel III.6	: Skor IDSD Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	32
Tabel III.7	: Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024.....	33
Tabel III.8	: Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024 Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional.....	34
Tabel III.9	: Perbandingan Realisasi Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra.....	34

Tabel III.10	: Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	36
Tabel III.11	: Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024.....	41
Tabel III.12	: Perbandingan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sampai Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra.....	47
Tabel III.13	: Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Kinerja Tahun 2024 (Persen).....	53
Tabel III.14	: Realisasi Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	54
Tabel IV.1	: Capaian Kinerja Tahunan Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 2021-2026 Tahun Anggaran 2022-2024.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	: Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Barenlitbangda Tahun 2024.....	5
Gambar III.1	: Aspek dan Indikator Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	28
Gambar III.2	: Kerangka Pengukuran IDSD 2024.....	30
Gambar III.3	: Metodologi Perhitungan IDSD 2024.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Lampiran II	: Pengukuran Kinerja Tahun 2024
Lampiran III	: Tabel Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024
Lampiran IV	: Cascading Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna
Lampiran V	: Lampiran Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkannya capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban setiap instansi sebagai unsur penyelenggara negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2023 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini disusun berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 adalah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban dalam memberikan informasi kinerja instansi. Adapun tujuan Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disusun ini antara lain:

01 Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

02 Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

1.4. Gambaran Umum

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16). Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 09 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Setda, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

b. Fungsi dan kewenangan

Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan pegkajian kebijakan daerah dan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;
- g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. Pelaksanaan pelayanan teknis dan administrative di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

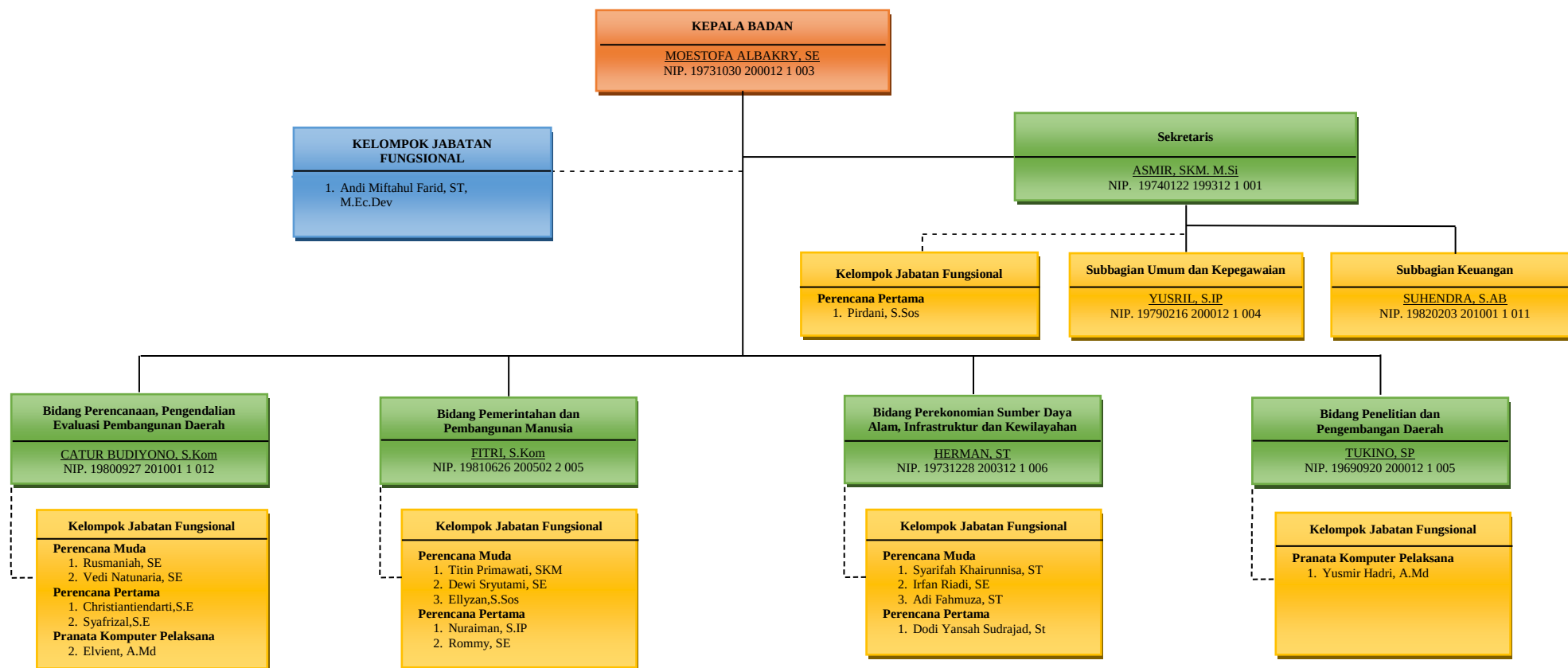
Dengan diundangkannya Peraturan Bupati Natuna Nomor 09 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Setda, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar. I.1
Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Barenlitbangda Kabupaten Natuna Tahun 2024

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TIPE A
 KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NATUNA
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tanggal : 3 Januari 2022



KEPALA BP3D KABUPATEN NATUNA

MOESTOFA ALBAKRY, SE
 NIP. 19731030 200012 1 003

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif (Executive summary)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.5. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Tentang cara pencapaian tujuan dan sasaran penetapan kinerja tahun 2024 yang menjadi acuan pengukuran kinerja yang berarti Renstra, Rencana Kerja (Renja), dan Penetapan Kinerja.

2.1. Rencana Strategis

Menguraikan tentang :

- 2.1.1. Visi dan Misi
- 2.1.2. Tujuan dan Sasaran
- 2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Natuna.

Bagian ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 dan menguraikan keberhasilan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja instansi serta saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

4.1 Kesimpulan

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- Tabel Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024
- Cascading Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna
- Lampiran Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, yang mana Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.



Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna
Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan
atas Peraturan
Daerah Kabupaten
Natuna Nomor 8
Tahun 2011 tentang
RPJPD Tahun
2005-2025

Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna
Nomor 20
Tahun 2021 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah Tahun
2021-2026

Keputusan Kepala
BP3D Nomor 14
Tahun 2022 tentang
Rencana Strategis
Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah Kabupaten
Natuna Tahun
2021-2026

2.1.1. Visi dan Misi

Visi

Visi yang ingin dicapai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan telaahan dari visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah:

***“Terwujudnya
Kabupaten Natuna
sebagai
Kabupaten Maritim
yang
Unggul, Eksotis,
Aman, dengan
Kemandirian
Ekonomi
Berlandaskan
Nilai Religius dan
Kultural”***

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2021-2026 tersebut adalah sebagai berikut:

❖ **Maritim yang Unggul**

Maritim yang unggul memiliki makna bahwa Kabupaten Natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim

❖ **Eksotis**

Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Kabupaten Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata.

❖ **Aman**

Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Kabupaten Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Kabupaten Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

❖ **Kemandirian Ekonomi**

Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya,

Kabupaten Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

❖ **Religius**

Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama.

❖ **Kultural**

Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan.

MISI

Misi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah:

1

Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

2

Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal

3

Menciptakan Kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis

4

Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur

5

Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan

6

Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)

7

Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna terletak di misi ke 6 (enam) yaitu ***“Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)”***. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki peranan dalam mewujudkan meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dan terwujudnya pelayanan publik yang prima.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Natuna yaitu:

Tabel II.1
Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2024

MISI 6 : “Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (<i>smart bureaucracy</i>).”				
Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Satuan	Target
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP Pemda oleh Kemenpanrb yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	80,00

	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Metode pengukuran dan penilaian IKKD dilakukan melalui 2 (dua) tahap, meliputi: a. pengukuran dan penilaian variabel kinerja pemerintah daerah; dan b. pengukuran dan penilaian variabel kepemimpinan kepala daerah.	Indeks	64
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Hasil penilaian diperoleh melalui kuesioner yang dibangun berdasarkan hasil persilangan antara sejumlah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik dan aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Indeks	4,5

Tabel II.2
Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	Nilai evaluasi LKjIP dari Inspektorat	Nilai	80,00
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (100 pengguna layanan)	Indeks	3,48
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Hasil penilaian aspek kesesuaian antara isu strategis target - Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD atau RKPD, dan aspek riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah.	Nilai	7,9
4	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Hasil Penghitungan Skor Nilai Indeks Daya Saing Daerah di Badan Riset Nasional (BRIN)	Nilai	2,9155

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*corebusiness*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai sasaran Perangkat Daerah (PD) yang telah ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia.

Tabel II.3
Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan merupakan ukuran kualitas perencanaan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan	Hasil penilaian aspek kesesuaian antara isu strategis target -Program/ Kegiatan/ Proyek di RPJMD atau RKPD, dan aspek riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah.
2	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen pengukuran daya saing dilakukan oleh BRIN untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.	Hasil Penghitungan Skor Nilai Indeks Daya Saing Daerah di Badan Riset Nasional (BRIN)

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Perjanjian kinerja ini disusun dengan memperhatikan dokumen Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	7,9
2	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,9155

Selanjutnya sasaran strategis diuraikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran.

Tabel II.5
Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung
Sasaran Strategis Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	Nilai	80,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	88,40	40.724.990,00
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	75,00	40.724.990,00
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	13.568.620,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	27.156.370,00
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	Persen	85,00	7.330.726.800,00
				Administrasi Keuangan	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5.575.240.882,00
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	42	5.575.240.882,00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	61.200.000,00
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	7.200.000,00

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	54.000.000,00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	83	633.758.940,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	45.783.000,00
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	11.149.700,00
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	54.570.000,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	20.000.000,00
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	4.720.000,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	488.516.240,00
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7.000.000,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	80	453.227.000,00
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	94.000.000,00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	63	352.227.000,00

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	345.860.428,00
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	15.000.000,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	17.997.000,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	312.863.428,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	83,00	322.639.550,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	106.870.750,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	15.932.800,00
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	199.836.000,00
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	7,9	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Persen	85,00	1.693.780.430,00
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	Persen	71	1.693.780.430,00

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	21.770.000,00
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	100.310.000,00
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	560.720.960,00
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD	Dokumen	4	1.010.979.470,00
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Persen	85	390.447.760,00
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	Persen	92	90.961.340,00
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	3	90.961.340,00
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindakan lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	85	299.486.420,00

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	299.486.420,00
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	93	714.985.940,00
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	94	714.985.940,00
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	11.100.000,00
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	71.206.000,00
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	255.479.420,00

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	8.050.000,00
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	369.150.520,00
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93,00	732.801.320,00
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	93,00	359.387.270,00
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	147.643.800,00

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	211743470
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	373.414.050,00
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	65.091.000,00
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	71.900.000,00
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	236.423.050,00
Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,9155	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	30	359.475.400,00
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	Persen	100	359.475.400,00
				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	359.475.400,00

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	60	206.530.120,00
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	206.530.120,00
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	206.530.120,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merujuk pada hasil atau pencapaian yang diperoleh oleh sebuah organisasi dalam melaksanakan tugas, mencapai tujuan, dan memenuhi target yang telah ditentukan. Capaian ini mencakup berbagai aspek yang mendefinisikan Keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, keberhasilan/kegagalan kinerja diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi SKPD. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja) perlu memperhatikan karakteristik, komponen, realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penghitungan capaian sasaran, ditetapkan dengan penilaian rata-rata seluruh capaian indikator kinerja hasil setiap sasaran yang hasilnya dikelompokkan dalam tujuh kategori penilaian sebagaimana mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Tabel III.1
Skala Penilaian

No.	Kategori	Nilai	Kategori Capaian
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup Baik
6	C	>30 – 50	Agak Kurang
7	D	0 – 30	Kurang

3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna terletak di misi ke 6 (enam) yaitu ***“Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)”***. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna memiliki peranan dalam mewujudkan meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dan terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Pencapaian kinerja tujuan diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang diukur melalui tiga indikator Tujuan yang capaiannya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III.2
Capaian Kinerja Tujuan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	80,00	78,70	98,37
		Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Indeks	64	39,33	61,45
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,5	3,32	73,77
Nilai rata-rata capaian kinerja						77,86

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 3 (tiga) indikator tujuan yang telah ditargetkan pada tahun 2024, capaian kinerja Nilai Sakip sangat memuaskan dengan capaian 98,37%, sedangkan capaian kinerja Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah tercapai 61,45% dengan kategory baik, dan capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik tercapai 73,77% dengan kategori sangat baik. Berdasarkan realisasi tersebut, rata-rata capaian indikator tujuan tahun 2024 mencapai 77,86 % dengan kategori sangat baik. Selanjutnya untuk melihat perbandingan capaian kinerja tujuan dari periode awal renstra sampai tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel III.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	Nilai	78	79,50	80,00	82	73,45	78,70	105,12	92,39	98,37
2	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Indeks	60	62	64	34,00	39,33	39,33	56,67	63,43	61,45
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,1	4,3	4,5	3,48	3,23	3,32	84,87	75,11	73,77

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Nilai Sakip pada tahun 2022 sangat memuaskan dengan capaian 105,12%, selanjutnya terjadi penurunan capaian pada tahun 2023 dengan capaian 92,39% dan terjadi kenaikan capaian pada tahun 2024 dengan capaian 98,37%. Capaian kinerja Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah pada tahun 2022 cukup baik tercapai 56,67%, sedangkan pada tahun 2023 tercapai 63,43% dengan kategori baik, dan pada tahun 2024 tercapai 61,45% terjadi penurunan akan tetapi masih dalam kategori baik. Capaian capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2022 tercapai 84,87% dengan kategori memuaskan, selanjutnya pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 75,11% dengan kategori sangat baik dan pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 73,77% dengan kategori masih sangat baik. Selanjutnya untuk melihat capaian kinerja tujuan pada tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir capaian renstra dapat dilihat pada table berikut:

Tabel III.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	2024			Target akhir Renstra	Capaian terhadap Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Nilai SAKIP	Nilai	80,00	78,70	98,37	80	98,37
2	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Indeks	64	39,33	61,45	68	57,83
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,5	3,32	73,77	4,5	73,77

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Nilai Sakip pada tahun 2024 tercapai 98,37% dengan kategori sangat memuaskan, jika dibandingkan dengan target akhir renstra tercapai 98,37% sama dengan capaian terhadap tahun 2024 hal ini karena target kinerja Nilai Sakip pada tahun 2024 sampai dengan 2026 (target akhir renstra) sama yaitu 80. Capaian kinerja Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah pada tahun 2024 tercapai 61,45% dengan kategori baik, jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 68 maka tercapai 57,83% dengan kategori cukup baik. Sedangkan capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 tercapai 73,77% dengan kategori memuaskan, jika dibandingkan dengan target akhir renstra tercapai 73,77% sama dengan capaian terhadap tahun 2024 hal ini karena target kinerja Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 sampai dengan 2026 (target akhir renstra) sama yaitu 4,5.

3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang diukur melalui empat indikator sasaran, dari empat indikator tersebut terdapat dua indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024. Capaian kinerja sasaran diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	Nilai	80,00	78,70	98,37
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,48	3,32	95,40
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	7,9	7,8	98,73
4	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,9155	3,34	114,56
Nilai rata-rata capaian kinerja						101,76

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna memiliki empat indikator sasaran yaitu Nilai Lakip dengan capaian 98,37% (sangat memuaskan), selanjutnya Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 95,40% (sangat memuaskan), kemudian Indeks Kualitas Perencanaan dengan capaian 98,73% (sangat memuaskan) dan Indeks Daya Saing Daerah dengan capaian 114,56% (sangat memuaskan). Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024 adalah 101,76% (sangat memuaskan).

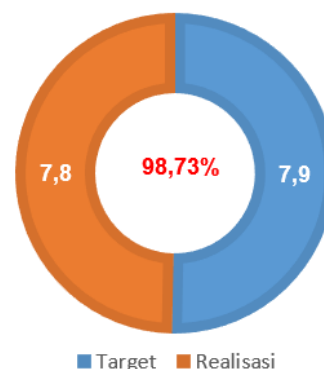
Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024, terdapat dua indikator sasaran yang menjadi **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yaitu **Indeks Kualitas Perencanaan dan Indeks Daya Saing Daerah**, dengan penjelasan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

SASARAN 1

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

INDEKS KUALITAS PERENCANAAN

Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) merupakan pengukuran perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) di daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada tahun 2024 target Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kabupaten Natuna sebesar 7,9 dan terealisasi sebesar nilai 7,8 sehingga dengan realisasi tersebut maka capaian IKP Kabupaten Natuna Tahun 2024 sebesar 98,73%.



Metode Pengukuran

Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kabupaten Natuna Tahun 2024 menggunakan dua aspek. Kedua aspek memiliki koherensi dengan kualitas perencanaan pembangunan. Aspek yang dimaksud adalah aspek kesesuaian antara isu strategis - target - program/kegiatan di RPJMD atau RKPD, dan aspek riset dan inovasi perencanaan pembangunan. Aspek dan indikator pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan dengan bagan kerangka berpikir sebagaimana Gambar 3.1 berikut ini:

Gambar III.1
Aspek dan Indikator Indeks Kualitas Perencanaan
Kabupaten Natuna tahun 2024



Setiap aspek Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) ditetapkan bobotnya. Penetapan bobot dimaksudkan untuk memberikan gambaran perbedaan tingkat kedalaman pengaruh setiap aspek terhadap nilai total IKP. Bobot setiap aspek, indikator, dan sub-aspek.

Hasil Pengukuran

Skor Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kabupaten Natuna Tahun 2024 sebesar 78 (skala 0-100) atau sebesar **7,8** (skala 0-10). Rincian nilai setiap aspek, indikator, dan sub-indikator dapat dilihat pada bagian akhir laporan ini. Aspek kesesuaian antara isu strategis - target - program/kegiatan di RPJMD atau RKPD mendapatkan skor 68 dari nilai maksimal 74 yang dapat dicapai. Capaian Aspek ini sebesar **91,89%**, yang menunjukkan bahwa secara umum permasalahan pembangunan, isu strategis, prioritas pembangunan, dan prioritas program telah sesuai. Aspek riset dan inovasi perencanaan mendapatkan skor 10 dari nilai maksimal 26 yang dapat dicapai. Capaian aspek ini sebesar **38,46%**. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi riset dan inovasi dalam perencanaan belum optimal. Hasil riset sejauh ini belum dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Inovasi yang berkaitan dengan perencanaan belum optimal baik secara jumlah maupun ketepatan dalam menjawab kebutuhan perencanaan.

Target IKP Tahun 2024 yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah sebesar **7,9**. Nilai IKP Tahun 2024 sebesar **7,8** sehingga capaian Nilai IKP terhadap Target IKP Tahun 2024 adalah sebesar **98,73%**. Jika dilihat perbandingan antara skor IKP tahun 2024 dengan tahun 2023 terlihat adanya peningkatan. Skor IKP tahun 2023 sebesar 7,6 sehingga tahun 2024 terjadi kenaikan skor IKP sebesar 0,2 poin atau meningkat sebesar 2,67%. Skor IKP pada tahun-tahun berikutnya dapat diupayakan untuk terus meningkat, terutama dengan meningkatkan inovasi daerah yang berkaitan dengan perencanaan. Selain itu juga dengan meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil riset pada perencanaan pembangunan.

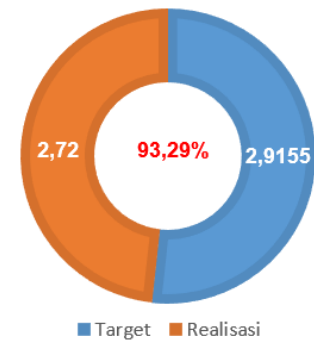
SASARAN 2

Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan

INDEK DAYA SAING DAERAH

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Berdasarkan Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, menunjukkan bahwa Kabupaten Natuna memperoleh Skor 3,34 sedangkan target IDSD Kabupaten Natuna pada tahun 2024 sebesar 2,9155, maka capaian IDSD Kabupaten Natuna tahun 2024 sebesar 114,56%.



Kerangka pengukuran IDSD 2024 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2024 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing. Jumlah indikator yang digunakan sebanyak 48 indikator untuk kabupaten/kota.

Kerangka Pengukuran

Kerangka pengukuran IDSD 2024 mengacu kepada *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing seperti pada gambar III.2 berikut:

Gambar III.2
Kerangka Pengukuran IDSD 2024



Sumber: diadopsi dari Global Competitiveness Index (WEF, 2019).
Keterangan: Komponen dan dimensi tidak masuk dalam penghitungan indeks dan hanya merupakan pengelompokan yang digunakan untuk tujuan analisis.

Komponen IDSD 2024



Lingkungan Pendukung

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu **Institusi** yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan keamanan; **Infrastruktur** yang dapat mendukung aktivitas perekonomian; **Adopsi TIK** yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan industri 4.0; dan **Stabilitas Ekonomi Makro** yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, serta tingkat biaya hidup.



Sumber Daya Manusia

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu **Kesehatan** yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup; dan **Keterampilan** yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.



Pasar

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu **Pasar Produk** yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; **Pasar Tenaga Kerja** yang mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; **Sistem Keuangan** yang merefleksikan kemampuan system finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan **Ukuran Pasar** yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya Iptek.



Ekosistem Inovasi

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu **Dinamisme Bisnis** yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja; dan **Kapabilitas Inovasi** yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Metodologi

Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD 2024 distandardisasi dengan metode min-max. Adapun setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama terhadap indeks sehingga diberikan bobot yang sama. Untuk menghitung indeks, dilakukan agregasi skor pilar daya saing menggunakan metode rata-rata aritmatik.

Gambar III.3
Metodologi Perhitungan IDSD 2024



Berdasarkan metodologi perhitungan yang dilakukan oleh BRIN, Rincian Skor IDSD Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Skor IDSD Kabupaten Natuna Tahun 2024

Nasional / Provinsi/ Kabupaten	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar			Ekosistem Inovasi		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Kep. Riau	4,20	2,88	4,66	4,23	3,83	3,85	1,04	3,82	2,14	4,78	2,58	2,80	3,40
Natuna	4,70	3,03	4,50	3,14	3,44	3,98	1,32	3,67	1,93	4,28	4,65	1,48	3,34

Keterangan:

Pilar 1 : Institusi	Pilar 5 : Kesehatan	Pilar 9 : Sistem Keuangan
Pilar 2 : Infrastruktur	Pilar 6 : Keterampilan	Pilar 10 : Ukuran Pasar
Pilar 3 : Adopsi TIK	Pilar 7 : Pasar Produk	Pilar 11 : Dinamisme Bisnis
Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja	Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara total skor IDSD Kabupaten Natuna tahun 2024 adalah 3,34, berada dibawah skor IDSD Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, akan tetapi terdapat empat pilar yang melebihi skor Provinsi dan Nasional yaitu pilar Institusi, pilar Infrastruktur, pilar Keterampilan dan Pilar Dinamisme Bisnis. Selanjutnya ada tiga pilar yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Natuna dalam upaya meningkat nilai IDSD tahun berikutnya, yaitu pada pilar Pasar Produk, Pilar Sistem Keuangan dan Pilar Kapabilitas Inovasi.

Kabupaten Natuna juga memiliki daya saing tinggi di bidang inovasi dan adopsi teknologi, yang tercermin dalam peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Peningkatan ini didorong oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung riset dan inovasi, yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem berbasis pengetahuan. Pilar utama daya saing ini adalah adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang menunjukkan angka tertinggi dalam indeks IDSD Kabupaten Natuna. Keberadaan kebijakan berbasis bukti ilmiah ini membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di sisi iklim investasi, Kabupaten Natuna berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para investor. Kebijakan daerah diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi investasi melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Perkembangan investasi ini diharapkan dapat menarik lebih banyak

modal masuk yang akan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Kondisi sosial yang stabil serta indeks kerukunan umat beragama yang tinggi juga turut mendukung terciptanya iklim investasi yang positif di Kabupaten Natuna.

Untuk melihat sejauhmana capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu adanya perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya serta perbandingan capaian dengan Provinsi dan Nasional serta perbandingan dengan Target Akhir renstra. Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.7
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Nilai LAKIP	Nilai	78,0	79,5	80,00	82	73,45	78,70	105,12	92,38	98,37
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,46	3,47	3,48	3,48	3,23	3,32	100,57	93,08	95,40
3	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	6,5	7,5	7,9	6,7	7,6	7,8	103,07	101,3	98,73
4	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8155	2,8255	2,9155	2,7355	2,72	3,34	97,15	96,26	114,56

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Nilai Lakip tahun 2024 lebih tinggi dari capaian tahun 2023 yaitu mencapai 98,37%, sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 Nilai Lakip tahun 2024 lebih rendah. Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 lebih tinggi dari capaian tahun 2023 yaitu mencapai 95,40%, sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 lebih rendah. Capaian kinerja Indeks Kualitas Perencanaan tahun 2024 lebih rendah dari capaian tahun 2023 dan tahun 2022 dan Capaian kinerja Indeks Daya Saing Daerah tahun 2024 lebih tinggi dari capaian tahun 2023 dan tahun 2022.

Selanjutnya Realisasi Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dibandingkan dengan Capaian Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.8
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 – 2024
Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

No.	Nasional/Prov/ Kab	Indeks Kualitas Perencanaan			Indeks Daya Saing Daerah		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Nasional	n.a	n.a	n.a	3,26	3,44	3,43
2	Provinsi Kep. Riau	n.a	n.a	n.a	3,36	3,38	3,40
3	Kabupaten Natuna	6,7	7,6	7,8	2,73	2,72	3,34

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kualitas Perencanaan tahun 2024 terealisasi sebesar 7,8 meningkat dari realisasi tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu 7,6 dan tahun 2022 yaitu 6,7. Untuk Indeks Kualitas Perencanaan Provinsi dan Nasional datanya tidak tersedia. Sedangkan pada Indeks Daya Saing Daerah tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu 2,73 dan tahun 2023 yaitu 2,72. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024 jika dibandingkan dengan Indeks Daya Saing Daerah Provinsi dan Nasional masih sangat rendah, nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Natuna adalah 2,34 sedangkan Provinsi Kepri 3,40 dan Nasional 3,43.

Realisasi kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra untuk melihat dan mengukur capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026. Capaian indikator kinerja terhadap target akhir Renstra untuk masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.9
Perbandingan Realisasi Sasaran
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024
dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Tahun 2024		Target akhir Renstra	Capaian terhadap Renstra
				Realisasi	Capaian		
1	Nilai LAKIP	Nilai	80,00	78,70	98,37	80	98,37
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,48	3,32	95,40	3,50	94,85
3	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	7,9	7,8	98,73	8,1	96,29
4	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,9155	3,34	114,56	3,1255	106,86
				Rata-rata	101,76		99,09

Tabel diatas menggambarkan Realisasi dan Capaian Sasaran tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra tahun 2026, pada Indikator Kinerja Nilai Lakip tahun 2024 terealisasi sebesar 78,70 sedangkan target akhir renstra adalah 80, sehingga capaiannya sebesar 98,37% atau sangat memuaskan. pada Indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat tahun 2024 terealisasi sebesar 3,32 sedangkan target akhir renstra adalah 3,50, sehingga capaiannya sebesar 94,85% atau sangat memuaskan, dan pada Indikator Kinerja Indeks Kualitas Perencanaan tahun 2024 terealisasi sebesar 7,8 sedangkan target akhir renstra adalah 8,1, sehingga capaiannya sebesar 96,29% atau sangat memuaskan dan Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah tahun 2024 terealisasi sebesar 3,34 sedangkan target akhir renstra adalah 3,1255 , sehingga capaiannya sebesar 106,86% atau sangat memuaskan. Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian indicator sasaran terhadap target akhir renstra dapat disimpulkan rata-rata capainya indikator sasaran terhadap target akhir renstra sebesar 99,09 atau sangat memuaskan.

3.1.3 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun 2024 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna melaksanakan 4 program, 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Semua Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dilakukan evaluasi dan pengukuran kinerja atas pelaksanaannya. Tujuan pengukuran kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan adalah untuk menilai sejauh mana suatu program atau aktivitas mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya yang ada, untuk melihat capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.10
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	88,40	78,70	89,02
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	75,00	94,87	126,49
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	Persen	85,00	77,77	91,49
Administrasi Keuangan	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	42	42	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	69,04	72,67
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	4	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	83	94,27	113,57
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	85	70,83
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	40	100,00

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	80	94,26	117,82
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	63	25	39,68
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	75	75,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	83,00	79,07	95,26
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Persen	85,00	98,71	116,12
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	Persen	71	16,79	23,64
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	100,00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2	100,00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	4	100,00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Persen	65	83,33	128,2

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	Persen	92	98,93	107,53
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	3	3	100,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	85	90	105,88
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4	100,00
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	93	100	107,52
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	94	100	106,38
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	8	100,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	8	100,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	8	100,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	8	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	1	100,00

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93,00	96	103,22
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	93,00	100	107,52
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	5	100,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	100	107,52
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	0	0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	3	100,00
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	30	25	83,33
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	Persen	100	100	100,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	1	100,00
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	60	45,10	75,16
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100	100,00
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	1	100,00

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024, masih terdapat capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan capaian dibawah 75%, diantaranya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tercapai 72,67%, selanjutnya sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan dengan dengan capaian 0,00%. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indicator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan hanya tercapai 39,68%. Selanjutnya sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan capaian 0,00%.

Untuk melihat sejauhmana capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu adanya perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target akhir renstra. Adapun perbandingan capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022-2024 dan perbandingan dengan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.11
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	88,30	88,35	88,40	82,82	73,45	78,70	93,79	83,13	89,02
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	89	70	75,00	90,50	100	94,87	101,60	142,85	126,49
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	Persen	80	85,00	85,00	100	77,77	77,77	125,00	91,49	91,49
Administrasi Keuangan	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	45	43	42	45	43	42	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	-	-	95	-	-	69,04	-	-	72,67
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	1	-	-	0	-	-	0,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	4	-	-	4	-	-	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	81	82	83	100	100	94,27	123,45	121,95	113,57
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	1	1	12	0	1	100,00	0,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	93	93	120	67	60	85	72,04	64,51	70,83
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	40	-	-	40	-	-	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	-	75	80	-	85	94,26	-	113,33	117,82
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	14	63	-	14	25	-	100,00	39,68
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	100	100	75,0	100	75	93,75	100,00	75,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	82	83	70	100	79,07	93,33	85,36	95,26
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	5	5	4	5	5	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	1	-	-	1	-	-	100,00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Persen	82	84,00	85,00	89,48	85,4	98,71	109,11	101,66	116,12
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	Persen	67	69	71	32,64	65,32	16,79	48,72	94,66	23,64
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	2	1	1	2	100,00	100,00	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	2	1	1	2	100,00	100,00	100,00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	2	4	2	2	4	100,00	100,00	100,00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Persen	63	64	65	64,29	66,52	83,33	102,05	103,93	128,2

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	Persen	90	90	92	97,86	97,86	98,93	108,73	108,73	107,53
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	3	3	3	3	0	3	100,00	0,00	100,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	55	60	85	64,29	80	90	116,89	133,33	105,88
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	93	93	93	90,91	84,42	100	97,75	90,77	107,52
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	92	93	94	90,91	100	100	98,82	107,52	106,38
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	-	-	8	-	-	8	100,00	-	100,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	8	8	8	8	8	100,00	100,00	100,00

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	-	-	8	-	-	8		-	100,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	11	-	8	11	-	8	100,00	-	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	93	93	89,47	93,48	96,00	96,20	100,51	103,22
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	93	93	93	94,83	100	100	101,97	107,52	107,52
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	5	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	93	93	72,97	100	100	78,46	107,52	107,52

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	-	-	3	-	-	3	-	-	100,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	-	3	3	-	0	100,00	-	0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	20	25	30	0	25	25	0,00	100,00	83,33
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50	55	60	49,05	37,1	45,10	98,10	67,45	75,16
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100	100	100	87,23	100	100,00	100,00	100,00
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2022-2024, secara umum capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hanya saja ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang tidak ada realisasi pada tahun sebelumnya karena kegiatan dan sub kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Selanjutnya untuk melihat Perbandingan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.12
Perbandingan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sampai Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target akhir Renstra	Realisasi sampai Tahun 2024	Capaian terhadap target akhir Renstra
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Laporan LKJIP	88,50	78,70	88,92
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	85	94,87	111,61
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	8	66,66
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	12	66,66
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	90	77,77	86,41
Administrasi Keuangan	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	42	70,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	69,04	72,67
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	0	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	4	16,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	85	94,27	110,90
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	48	80,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	48	80,00

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	48	80,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	48	80,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	3	60,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	644	305	47,36
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200	40	20,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	85	94,26	110,89
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	5	25,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	25	125,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	75	75,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	48	80,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	48	80,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	48	80,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	85	79,07	93,02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	5	83,33
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	15	75,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPd	87	98,71	113,45
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPd	74	16,79	22,68
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	4	80,00
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	6	4	66,66
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6	4	66,66
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPd)	12	8	66,66

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	67	83,33	124,37
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	95	98,93	103,15
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	18	12	66,66
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindakan lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	75	90	120,00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	24	16	66,66
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	94	100	106,38
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	96	100	104,16
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40	24	60,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40	24	60,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40	24	60,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	40	24	60,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6	4	66,66
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	94	96,00	102,12
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA	93	100	107,52
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	25	15	60,00

Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25	15	60,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	93	100	107,52
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15	9	60,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15	3	20,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	15	9	60,00
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	40	25	62,50
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	100	100	100,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5	3	60,00
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	65,0	45,10	75,16
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100	100	100,00
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5	3	60,00

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja pada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator kinerja diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap usulan prioritas pembangunan, sehingga banyaknya usulan dari masyarakat yang tidak bisa diakomodir.
2. Kontribusi riset dan inovasi dalam perencanaan masih rendah. Hasil-hasil riset sejauh ini belum dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Inovasi yang berkaitan dengan perencanaan belum optimal baik secara jumlah maupun ketepatan dalam menjawab kebutuhan perencanaan

Berdasarkan permasalahan tersebut, upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan guna percepatan meningkatkan capaian kinerja diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran selaras dengan RPJMD dan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kepulauan Riau
2. Meningkatkan kapasitas inovasi dengan melakukan pengembangan inovasi melalui riset, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi.
3. Melakukan pendampingan terhadap pemerintah desa dalam proses penyampaian usulan prioritas masyarakat.

Secara umum keberhasilan pencapaian keseluruhan indikator kinerja sasaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna antara lain didukung oleh:

1. Pelaksanaan perencanaan yang telah menggunakan sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna (*e-Planning*) yang telah terintegrasi dari RPJMD, Renstra, Renja yang disinkronkan dengan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dimana antara Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Kecamatan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Semua proses perencanaan telah menggunakan sistem aplikasi Infis Perencanaan (*e-planning*).

2. Dalam pencapaian indikator kinerja, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan evaluasi pencapaian program dan kegiatan setiap Triwulan yaitu Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV dengan menggunakan aplikasi ekejab.
3. Melaksanakan monitoring dan reviu secara berkala terhadap Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.
4. Melaksanakan reviu secara berkala terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Natuna.
5. Melaksanakan monitoring pencapaian target jangka menengah semua program dan kegiatan dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.
6. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi laporan kinerja BP3D dan hasil evaluasi lainnya seperti hasil evaluasi rancangan akhir RKPD dan hasil evaluasi lainnya dari Inspektorat Kabupaten Natuna maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

3.1.5 Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya adalah proses yang dilakukan untuk menilai sejauh mana organisasi menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan seefisien mungkin, tanpa pemborosan, agar organisasi dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya dan usaha yang minimal.

Jumlah belanja langsung Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna sebesar Rp. 15.128.049.162,00 dialokasikan untuk mendukung empat indikator sasaran strategis, dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 11.083.445.402,00 atau 73,26%, sedangkan realisasi akuntabilitas kinerja sebesar 101,76% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 28,50%. Untuk melihat tingkat Efisiensi penggunaan sumber daya capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.13
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Kinerja
Tahun 2024 (persen)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	98,37	53,67	44,70
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,40	83,23	12,17
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	98,73	45,92	52,81
4	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	114,56	51,16	63,40
Rata-rata			101,76	73,26	28,50

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tahun 2024 terdapat empat program yang mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan total anggaran sebesar Rp 15.128.049.162,00. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendukung dua indikator sasaran yaitu Nilai LAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 9,805,011,032.00. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagian besar untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan untuk operasional rutinitas kantor.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung indikator Indeks Kualitas Perencanaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.604.316.400,00, dua program tersebut memberikan intervensi yang besar dalam tercapainya target kinerja.

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah mendukung Indeks Daya Saing Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 718.721.730,00, Program ini dinilai tidak banyak memberikan intervensi terhadap capaian Indeks Daya Saing Daerah karena hanya mendukung satu pilar yaitu Pilar Kapabilitas Inovasi dari dua belas pilar pembentuk Indeks Daya Saing Daerah, yang mana pada pilar kapabilitas inovasi masih rendah kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal di Kabupaten Natuna, perlunya dorongan kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkat

inovasi daerah serta perlunya mengalokasikan anggaran untuk melakukan riset dan penelitian.

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302), alokasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 sebesar Rp 11.168.636.760,00 (Sebelas milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dilakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 322), anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengalami perubahan kenaikan menjadi Rp 15.128.049.162,00 (Lima belas milyar seratus dua puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Tabel III.14
Realisasi Anggaran
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis, Indikator dan Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator (%)
		Anggaran	Realisasi	%	
Sasaran: Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah					
Nilai LAKIP		53.213.610	28.558.394	53,67	98,37
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	53.213.610	28.558.394	53,67	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.213.610	28.558.394	53,67	
Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat					
Indeks Kepuasan Masyarakat		9.751.797.422	8.116.580.469	83,23	95,40
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.751.797.422	8.116.580.469	83,23	
	Administrasi Keuangan	6,939,576,284	6,443,075,800	92,85	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.200.000	53.209.071	86,94	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	952.241.910	649.370.088	68,19	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	1.019.079.000	463.888.000	45,52	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.431.428	381.387.720	89,02	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.268.800	125.649.790	35,77	

No	Sasaran Strategis, Indikator dan Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator (%)
		Anggaran	Realisasi	%	
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah					
Indeks Kualitas Perencanaan		4.604.316.400	2.570.604.883	55,83	98,73
I	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.843.903.520	1.745.702.966	61,38	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.937.199.400	1.318.327.213	68,05	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	102.781.340	25.147.107	24,47	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	803.922.780	402.228.646	50,03	
II	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.760.412.880	824.901.917	46,86	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	877.611.560	456.057.037	51,97	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	459.387.270	137.144.148	29,85	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	423.414.050	231.700.732	54,72	
Sasaran: Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan					
Indeks Daya Saing Daerah		718,721,730	67,701,656	51,16	114,56
I	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	718,721,730	67,701,656	51,16	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	377.041.020	219.775.426	58,29	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	341.680.710	147.926.230	43,29	
TOTAL		15,128,049,162	11,083,445,402	73,26	101,76

Dari tabel diatas dapat lihat bahwa total anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 sebesar Rp 15.128.049.162,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.083.445.402 dengan capaian 73,26%. Total anggaran tersebut terdiri dari empat program yang mendukung sasaran strategis, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung indikator Nilai Lakip dengan jumlah anggaran Rp. 53.213.610,00 kemudian terealisasi sebesar Rp 28.558.394 dengan capaian 53,67%, selanjutnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan jumlah anggaran Rp. 9.751.797.422 kemudian terealisasi sebesar Rp 8.116.580.469 dengan capaian 83,23%.

Selanjutnya Indeks Kualitas Perencanaan didukung oleh dua program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 2.843.903.520 kemudian terealisasi sebesar Rp 1.745.702.966 dengan capaian 61,38% dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 1.760.412.880 dan terealisasi sebesar Rp 824.901.917 dengan capaian 46,86%.

Sedangkan pada Indeks Kualitas Perencanaan didukung oleh dua program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 718,721,730 kemudian terealisasi sebesar Rp 67,701,656 dengan capaian 51,16%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka perwujudan “*good governance*”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan ke dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Telah ditetapkan rencana kinerja yang menjadi komitmen Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan pembangunan tahun 2024. Dari rencana tersebut dapat diidentifikasi upaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Natuna.

Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang tersedia melalui APBD Kabupaten Natuna Tahun 2024 adalah sebesar Rp. Rp 15.128.049.162,00 (Lima belas milyar seratus dua puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah) Dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pendukung semua indikator sasaran strategis baik Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Non IKU.

Sasaran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna yang tercakup dalam 4 program dan 15 kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2024 dapat dicapai sepenuhnya dengan capaian 101,76% dengan kategori “**AA atau SANGAT MEMUASKAN**”. Hal ini menunjukkan adanya komitmen penuh dari Pimpinan (kepala) beserta dukungan pegawai/staf dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta sarana dan prasarana pendukung

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024. Faktor pendukung capaian indikator sasaran diantaranya keberhasilan kegiatan Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah (*e-planning*) dengan aplikasi Infis Perencanaan Kabupaten Natuna (*e-planning*) yang telah terintegrasi dari RPJMD, Renstra, Renja yang disinkronkan dengan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dimana antara Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Kecamatan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Selain itu, hal yang tak kalah penting dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini adalah adanya koordinasi yang baik dalam internal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap capaian indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui evaluasi hasil RKPD yang dilaksanakan setiap triwulan, dan peran pimpinan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mendampingi dan menekankan kepada bidang-bidang yang membawahi SKPD sesuai bidangnya dalam mengawal dan mengevaluasi pencapaian indikator kinerjanya sehingga dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1
Capaian Kinerja Tahunan
Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 2021-2026
Tahun Anggaran 2022-2024

MISI 6 : “Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (<i>smart bureaucracy</i>)”						
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja		
				2022	2023	2024
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	105,12	92,38	98,37
	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	100,57	93,08	95,40
		Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	103,07	101,3	114,56
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,15	96,26	93,29
Nilai rata-rata capaian kinerja				101,47	95,75	101,76

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian kinerja tahun 2022 sebesar 101,47% kemudian pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 95,75, dan pada tahun 2024 terjadi kenaikan menjadi 101,76. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja Tahun 2024 diantaranya agar dapat melakukan pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan program/kegiatan agar realisasi capaian kinerja dan anggaran dapat tercapai sesuai target, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah terkait dengan pencapaian indikator yang memerlukan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, serta meningkatkan kapasitas inovasi dengan melakukan pengembangan inovasi melalui riset, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi serta meningkatkan kreatifitas yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dimasa datang.

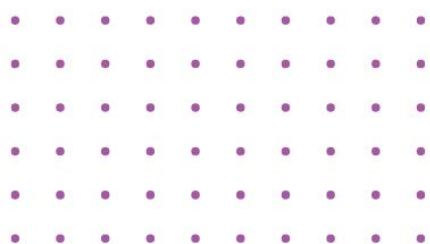
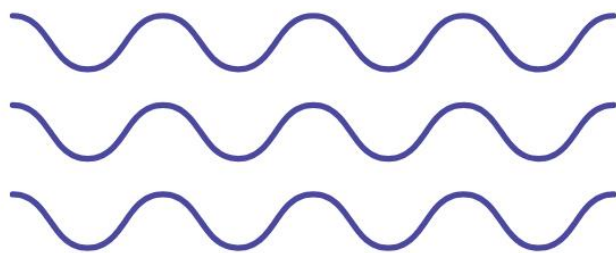
Ranai, 17 Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna


MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003



LAMPIRAN



<https://bp3d.natunakab.go.id/>





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MOESTOFA ALBAKRY, SE**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	7.9
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Dalam Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,9155

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	7.070.615.790,00
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	2.084.228.190,00
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	1.447.787.260,00
4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	566.005.520,00
Jumlah	Rp.	11.168.636.760,00

Ranai, 08 Januari 2024

Bupati Natuna,

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah


WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si


MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MOESTOFA ALBAKRY, SE**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 11.168.636.760,00 (Sebelas milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh) menjadi Rp. 15.128.049.162,00 (Lima belas milyar seratus dua puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panai, 20 September 2024

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	7.9
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Dalam Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,9155

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	9.805.011.032,00
2. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	718.721.730,00
3. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	2.843.903.520,00
4. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	1.760.412.880,00
Jumlah	Rp.	15.128.049.162,00

Ranai, 20 September 2024

Bupati Natuna,


WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah


MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	7,90	7,8	98,73
2	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,9155	3,34	114,56

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.805.011.032,00	Rp. 8.145.138.863,00	83,07
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 718.721.730,00	Rp. 367.701.656,00	51,16
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.843.903.520,00	Rp. 1.745.702.966,00	61,38
4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.760.412.880,00	Rp. 824.901.917,00	46,86
JUMLAH	Rp. 15.128.049.162,00	Rp. 11.083.445.402,00	73,26

Ranai, 9 Januari 2025

Bupati Natuna,



Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna

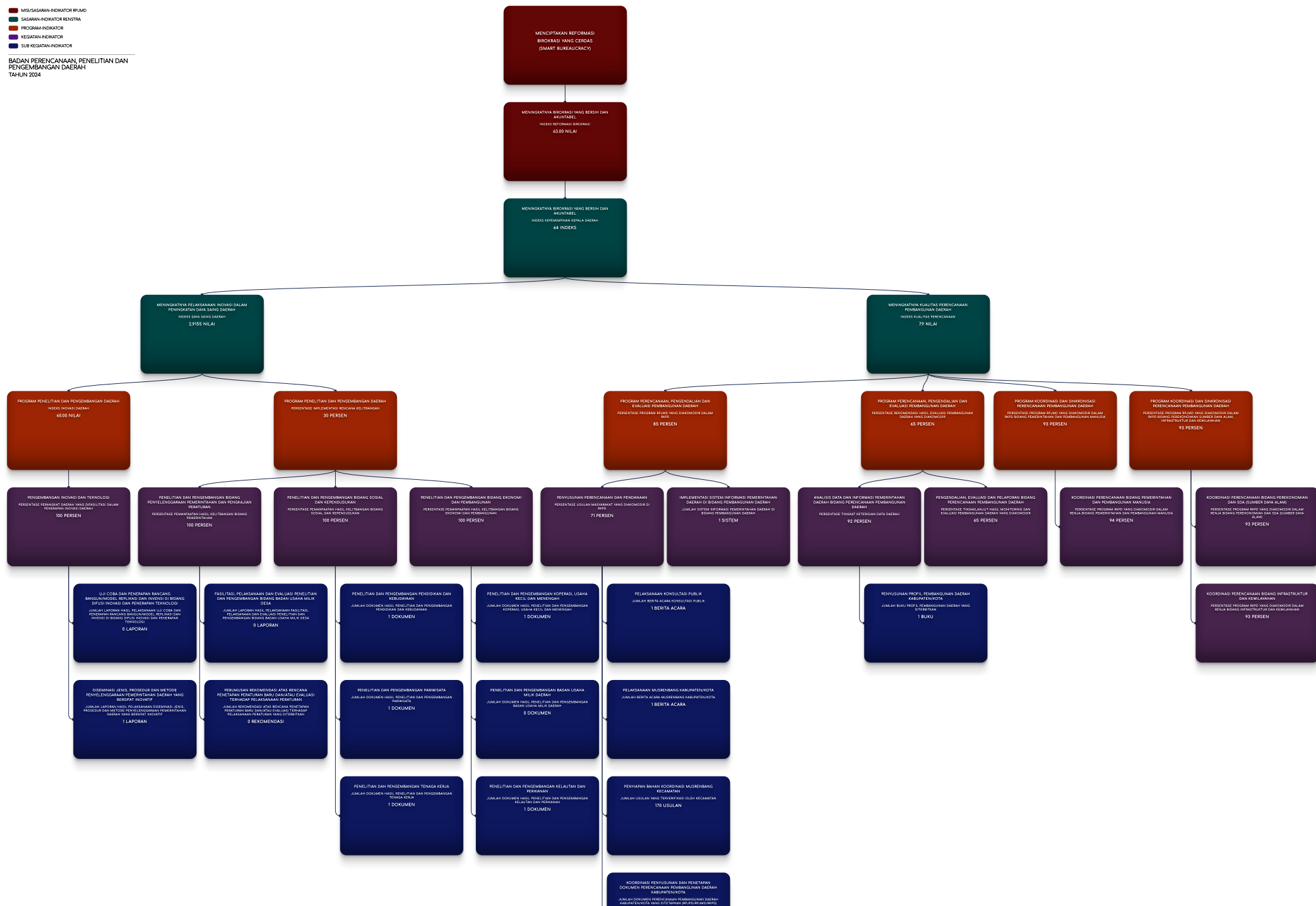


TABEL PENILAIAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator		Opsis	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen	Skor (Penilaian Assessor)	Pernyataan Assessor	Argumen Assessor	Lampiran Bukti (Tangkapan Layar Dokumen)
INDEKS KUALITAS PERENCANAAN				100	mempertimbangkan Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD, dan Tingkat Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan pemda.		78			
a.	Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan di RPJMD atau RKPD			74	Mengukur Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD.	Mencantumkan dokumen RPJMD dan RKPD.	68			
	1)	Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah			24	Mengukur Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah.		18		
	a)	Keterkaitan permasalahan daerah (kebutuhan daerah) dengan hasil evaluasi	A. Penyusunan kebutuhan daerah sama dengan atau kurang dari 25% hasil evaluasi A = 1 B. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% hasil evaluasi B = 2 C. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% hasil evaluasi C = 4 D. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% hasil evaluasi D = 6 E. Penyusunan kebutuhan daerah 100% berdasarkan hasil evaluasi E = 8	8	Mengukur keterkaitan permasalahan daerah (kebutuhan daerah) dengan hasil evaluasi	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	6	Terdapat 1 permasalahan pembangunan Kabupaten Natuna yang tidak didukung oleh bukti hasil evaluasi, yaitu "Belum terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"	Dari 5 permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Natuna didapatkan 4 permasalahan yang koheren dengan hasil evaluasi RKPD Tahun 2022. Tidak ditemukan tabel hasil evaluasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pada RKPD 2024. Assessor memberikan skor 8 dengan asumsi bahwa penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% hasil evaluasi	Lampiran 1
	b)	Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan	A. Kesesuaian sama dengan atau kurang dari 25% A = 1 B. Kesesuaian lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% B = 2 C. Kesesuaian lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% C = 4 D. Kesesuaian lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% D = 6 E. Kesesuaian 100% E = 8	8	Mengukur keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	8	Prioritas pembangunan yang ditetapkan telah mengacu atau telah didasari oleh permasalahan pembangunan	Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 yang disebutkan dalam RKPD tahun 2024 hal IV-14 s.d IV-16 telah mengacu atau berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang diuraikan pada Dokumen RKPD Tahun 2024 hal II-172 s.d. II-175	Lampiran 2

	c)	Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis	A. Penyusunan prioritas sama dengan atau kurang dari 25% isu strategis yang telah diidentifikasi A = 1 B. Penyusunan prioritas lebih dari 25% dan sama dengan atau lebih besar 50% isu strategis yang telah diidentifikasi B = 2 C. Penyusunan prioritas lebih dari 50% dan sama dengan atau lebih besar 75% isu strategis yang telah diidentifikasi C = 4 D. Penyusunan prioritas lebih dari 75% dan sama dengan atau lebih besar 99% isu strategis yang telah diidentifikasi D = 6 E. Penyusunan prioritas 100% berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi E = 8	8	Mengukur keterkaitan penyusunan prioritas pembangunan daerah dengan isu strategis.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	4	Prioritas pembangunan telah mengacu pada isu-isu strategis, namun tidak semua isu strategis diakomodir menjadi prioritas pembangunan	8 prioritas pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2024 telah mengacu dan terkait dengan isu strategis daerah maupun nasional. Namun demikian masih adanya isu strategis nasional yang belum secara spesifik dirumuskan menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2024. Isu-isu strategis nasional yang dimaksud adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran yang disertai decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan Dalam Rangka Mendorong Produktivitas serta ekonomi hijau.	Lampiran 3
	2)	Kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah		18	Mengukur kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	18			
	a)	Tersedianya indikator sasaran untuk isu strategis/prioritas pembangunan daerah	A. Tidak ada A = 0 B. Ada B = 6	6	Pemerintah daerah memiliki indikator sasaran untuk isu strategis/prioritas pembangunan daerah	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	6	Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki indikator sasaran untuk isu strategis/prioritas pembangunan daerah	Tabel T.IV-3 pada Dokumen RKPd Tahun 2024 halaman IV-31 sampai dengan IV-33 telah cukup untuk menunjukkan dan menjelaskan adanya indikator sasaran untuk isu strategis/prioritas pembangunan daerah	Lampiran 4
	b)	Tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah/prioritas pembangunan daerah	A. =< 25% A = 2 B. 25% - 50% B = 5 C. 50% - 75% C = 8 D. => 75% D = 12	12	Mengukur Tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah/prioritas pembangunan daerah.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	12	Indikator sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Natuna telah sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan isu strategis	Tabel T.IV-3 pada Dokumen RKPd Tahun 2024 halaman IV-31 sampai dengan IV-33 telah cukup untuk menunjukkan dan menjelaskan kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis	Lampiran 5
	3)	Kesesuaian Program/Kegiatan dalam mencapai target dan sasaran program		32	Mengukur kesesuaian program/kegiatan/proyek dalam mencapai target dan sasaran program.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	32			
	a)	Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan menjadi program prioritas	A. =< 25% A = 4 B. 25% - 50% B = 8 C. 50% - 75% C = 12 D. => 75% D = 16	16	Mengukur proporsi prioritas pembangunan daerah dijabarkan menjadi program prioritas.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	16	Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 telah dijabarkan menjadi program prioritas	Prioritas pembangunan daerah yang berdasarkan isu strategis Kabupaten Natuna Tahun 2024 yang diuraikan menjadi 8 poin prioritas, seluruhnya telah dijabarkan menjadi program prioritas	Lampiran 6
	b)	Tingkat Keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas	A. =< 25% A = 4 B. 25% - 50% B = 8 C. 50% - 75% C = 12 D. => 75% D = 16	16	Mengukur Tingkat Keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	16	Indikator kinerja program prioritas terkait lebih dari 75% terhadap indikator prioritas pembangunan	Tabel T.IV-5 pada Dokumen RKPd Tahun 2024 halaman IV-55 sampai dengan IV-80 telah cukup untuk menunjukkan dan menjelaskan keterkaitan indikator kinerja program prioritas terhadap indikator prioritas pembangunan	Lampiran 7

b.	Riset dan Inovasi Perencanaan Pembangunan			26	Mengukur tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemda dalam proses Perencanaan pembangunan.	Mencantumkan Dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD)	10			
1)	Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	A. 0	A = 0	6	Mengukur jumlah hasil riset yang dimanfaatkan pada perencanaan pembangunan.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	0	Tidak ada hasil riset yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Hasil riset-riset dapat memperkuat argumen dari sudut pandang akademis dalam perencanaan pembangunan. Dalam Dokumen RKPD tahun 2024 tidak ditemukan adanya daftar hasil riset yang dimanfaatkan atau menjadi landasan akademis dalam penyusunan perencanaan pembangunan.	--
		B. 1-3	B = 2							
		C. 4-6	C = 4							
		D. 7 atau lebih	D = 6							
2)	Keterkaitan permasalahan dengan Inovasi yang dilaksanakan	A. Lemah B. Kuat	A = 2 B = 4	4	Mengukur Keterkaitan permasalahan dengan Inovasi yang dilaksanakan.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	4	Inovasi perencanaan yang dilakukan berkaitan lemah dengan permasalahan pembangunan daerah, atau berkaitan tapi tidak secara langsung	Inovasi "KeREN natuna" secara langsung menjawab permasalahan pembangunan daerah. Tingkat keterkaitannya dapat diasumsikan kuat.	Lampiran 8
3)	Keterkaitan output dengan outcome inovasi	A. Lemah B. Kuat	A = 2 B = 4	4	Mengukur Keterkaitan Output dengan outcome Inovasi.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	2	Keterkaitan output dengan outcome inovasi yang telah dilakukan kuat	Inovasi KeREN Natuna (Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah Natuna) masih embrio, sehingga belum dirasakan secara langsung mendukung proses perencanaan	Lampiran 9
4)	Jumlah proyek inovasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	A. 0	A = 0	12	Mengukur jumlah inovasi perencanaan pembangunan.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	4	Jumlah inovasi yang dilakukan sebanyak 3 inovasi	Inovasi yang "diakui" sebagai inovasi perencanaan adalah inovasi yang telah melalui proses dan mekanisme inovas daerah sesuai dengan PP No 38 Tahun 2017 serta berkaitan dengan perencanaan pembangunan	Lampiran 10
		B. 1-5	B = 4							
		C. 6-10	C = 8							
		D. 10 atau lebih	D = 12							
					100,00	Skor Total	78,00			





EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100														
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
5.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																											
5.01.		PERENCANAAN																											
5.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan UKJIP	Nilai	88.35	178,132,000	156.27	117,851,994	88.35	40,000,000	88.35	53,213,610	73.45	16,494,489	73.45	1,586,373	78.7	1,586,373	78.7	8,891,159	79	28,558,394	89.08	53.67	234.97	117,851,994	265.95	66.16	
5.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	178,132,000	189	117,851,994	70	40,000,000	70	53,213,610	35.29	16,494,489	35.29	1,586,373	76.92	1,586,373	76.92	8,891,159	77	28,558,394	109.89	53.67	265.92	117,851,994	379.89	66.16	
5.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	104,066,000	4	7,696,107	2	20,000,000	2	13,568,620	0	7,696,107	0	0	2	0	0	0	2	7,696,107	100.00	56.72	6	7,696,107	300.00	7.40	
5.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	74,066,000	6	110,155,887	3	20,000,000	3	39,644,990	3	8,798,382	0	1,586,373	0	1,586,373	0	8,891,159	3	20,862,287	100.00	52.62	9	110,155,887	300.00	148.73	
5.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,067,806,973	200	22,411,553,708	85	5,320,613,617	85	9,744,797,422	77.77	2,143,885,395	77.77	2,417,246,241	77.77	1,760,206,867	77.77	1,553,174,197	78	7,874,512,700	91.49	80.81	277.77	22,411,553,708	326.79	369.35	
5.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,652,230,973	1	18,617,329,456	1	3,979,057,514	1	6,939,576,284	1	1,834,233,856	1	1,931,834,007	1	1,478,698,296	1	1,198,309,641	1	6,443,075,800	100.00	92.85	2	18,617,329,456	200.00	400.18	
5.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58	4,652,230,973	88	18,617,329,456	58	3,979,057,514	58	6,939,576,284	42	1,834,233,856	42	1,931,834,007	42	1,478,698,296	42	1,198,309,641	42	6,443,075,800	72.41	92.85	130	18,617,329,456	224.14	400.18	
5.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	142,800,000	95	0	95	110,000,000	95	61,200,000	64.28	0	66.66	0	69.04	0	69.04	0	69	0	72.67	0.00	164.04	0	172.67	0.00	
5.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	46,400,000	0	0	1	30,000,000	1	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	50,000,000	0	5	40,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	46,400,000	0	0	5	40,000,000	5	54,000,000	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	80.00	0.00	4	0	80.00	0.00	
5.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	82	528,776,000	100	1,721,731,381	82	317,500,000	82	952,241,910	92.41	64,403,928	94.27	154,148,805	94.27	166,258,624	94.27	236,802,534	94	621,613,891	114.96	65.28	194.27	1,721,731,381	236.91	325.61	
5.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	70,000,000	25	94,031,950	12	35,000,000	12	60,477,000	3	0	3	23,039,800	3	8,387,200	3	2,385,500	12	33,812,500	100.00	55.91	37	94,031,950	308.33	134.33	
5.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8,000,000	52	37,046,700	12	12,000,000	12	16,449,900	3	6,004,700	3	4,500,500	3	0	3	4,957,500	12	15,462,700	100.00	94.00	64	37,046,700	533.33	463.08	
5.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	20,000,000	0	12	5,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	24	133,839,590	12	30,000,000	12	58,539,640	3	0	3	11,600,000	3	5,000,000	3	26,110,000	12	42,710,000	100.00	72.96	36	133,839,590	300.00	334.60	
5.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	14,400,000	21	17,700,000	12	20,000,000	12	20,000,000	3	1,800,000	3	3,500,000	3	1,800,000	3	1,800,000	12	8,900,000	100.00	44.50	33	17,700,000	275.00	122.92	
5.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	12	31,642,000	1	5,000,000	1	4,720,000	0	0	0	860,000	1	1,290,000	0	0	1	2,150,000	100.00	45.55	13	31,642,000	1,300.00	316.42	
5.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	93	359,176,000	142	1,401,571,141	93	200,000,000	93	783,035,370	19	56,599,228	13	110,648,505	25	143,881,424	28	201,549,534	85	512,678,691	91.40	65.47	227	1,401,571,141	244.09	390.22	
5.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	0	5,900,000	40	10,500,000	40	9,020,000	10	0	10	0	10	5,900,000	10	0	40	5,900,000	100.00	65.41	40	5,900,000	100.00	81.94	
5.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	60,000,000	85	589,636,000	75	232,500,000	75	1,012,079,000	92.4	122,634,000	94.26	208,301,000	94.26	7,401,000	94.26	5,802,000	94	344,138,000	125.68	34.00	179.26	589,636,000	239.01	982.73	
5.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	10,000,000	0	0	5	45,000,000	5	94,000,000	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	40.00	0.00	2	0	40.00	0.00	
5.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	14	589,636,000	5	187,500,000	5	918,079,000	6	122,634,000	13	208,301,000	1	7,401,000	0	5,802,000	20	344,138,000	400.00	37.48	34	589,636,000	680.00	1179.27	
5.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	474,000,000	170	1,191,708,631	100	436,556,103	100	428,431,428	75	94,874,539	75	104,298,821	75	88,607,539	75	66,107,120	75	353,888,019	75.00	82.60	245	1,191,708,631	245.00	251.42	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16		
5.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	24	40,656,000	12	12,000,000	12	18,744,000	3	7,236,000	3	7,200,000	3	564,000	3	3,744,000	12	18,744,000	100.00	100.00	36	40,656,000	300.00	677.60			
5.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18,000,000	24	29,031,500	12	18,000,000	12	35,127,000	3	4,059,000	3	1,577,000	3	0	3	3,508,000	12	9,144,000	100.00	26.03	36	29,031,500	300.00	161.29			
5.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	450,000,000	28	1,122,021,131	12	406,556,103	12	374,560,428	3	83,579,539	3	95,521,821	3	88,043,539	0	58,855,120	9	326,000,019	75.00	87.04	37	1,122,021,131	308.33	249.34			
5.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	82	210,000,000	0	291,148,240	82	245,000,000	82	351,268,800	78.64	27,739,072	78.07	18,663,608	79.07	19,241,408	79.07	46,152,902	79	111,796,990	96.43	31.83	79.07	291,148,240	96.43	138.64			
5.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	60,000,000	12	228,601,240	4	75,000,000	4	119,000,000	5	24,239,072	5	18,663,608	5	14,691,408	5	26,422,902	5	84,016,990	125.00	70.60	17	228,601,240	425.00	381.00			
5.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30,000,000	5	62,547,000	5	30,000,000	5	32,432,800	5	3,500,000	5	0	5	4,550,000	5	19,730,000	5	27,780,000	100.00	85.65	10	62,547,000	200.00	208.49			
5.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000	0	0	1	50,000,000	1	199,836,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00			
5.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
5.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40,000,000	0	1	40,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
5.01.02.		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Persen	84	1,130,000,000	85.4	2,596,797,734	84	1,001,000,000	84	1,937,199,400	97.71	400,591,088	97.71	325,961,154	98.71	490,769,949	98.71	54,836,500	99	1,272,158,691	117.51	65.67	184.11	2,596,797,734	219.18	229.81			
5.01.02.2.01.		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	Persen	69	1,080,000,000	97.96	2,596,797,734	69	881,000,000	69	1,937,199,400	14.89	400,591,088	14.89	325,961,154	14.89	490,769,949	0	54,836,500	15	1,272,158,691	21.58	65.67	112.85	2,596,797,734	163.55	240.44			
5.01.02.2.01.03.		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	120,000,000	2	22,490,500	1	100,000,000	1	21,770,000	1	8,000,000	1	195,500	0	0	0	0	1	8,195,500	100.00	37.65	3	22,490,500	300.00	18.74			
5.01.02.2.01.04.		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	110,000,000	2	161,444,500	1	100,000,000	1	100,310,000	1	50,797,500	1	2,125,000	0	0	0	0	1	52,922,500	100.00	52.76	3	161,444,500	300.00	148.77			
5.01.02.2.01.05.		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	280,000,000	2	1,021,940,199	1	200,000,000	1	554,328,960	1	306,327,806	1	98,775,954	0	0	0	0	2	405,103,760	200.00	73.08	4	1,021,940,199	400.00	364.98			
5.01.02.2.01.06.		Penylopan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	170	50,000,000	0	170	50,000,000	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
5.01.02.2.01.07.		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)	Dokumen	2	520,000,000	4	1,390,922,535	2	431,000,000	2	1,260,790,440	0	35,465,782	0	224,864,700	3	490,769,949	1	54,836,500	4	805,936,931	200.00	63.92	8	1,390,922,535	400.00	267.49			
5.01.02.2.04.		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Sistem	1	50,000,000	0	1	120,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
5.01.02.2.04.02.		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	4	50,000,000	0	4	120,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
5.01.02.		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Persen	64	680,000,000	65.52	532,110,982	64	490,000,000	64	906,704,120	83.33	13,102,000	83.33	44,330,514	83.33	46,854,604	0	22,783,668	83	127,070,786	130.20	14.01	148.85	532,110,982	232.58	78.25			
5.01.02.2.02.		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterislan Data Daerah	Persen	90	400,000,000	97.86	0	90	250,000,000	90	102,781,340	98.93	0	98.93	0	98.93	0	0	0	99	0	109.92	0.00	196.79	0	218.66	0.00			
5.01.02.2.02.01.		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	3	300,000,000	3	0	3	150,000,000	3	102,781,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	0	100.00	0.00				
5.01.02.2.02.03.		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	100,000,000	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
5.01.02.2.03.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindakanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	60	280,000,000	80	532,110,982	60	240,000,000	60	803,922,780	0	13,102,000	0	44,330,514	90	46,854,604	0	22,783,668	90	127,070,786	150.00	15.81	170	532,110,982	283.33	190.04			
5.01.02.2.03.03.		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	280,000,000	9	532,110,982	4	240,000,000	4	803,922,780	1	13,102,000	1	44,330,514	1	46,854,604	0	22,783,668	3	127,070,786	75.00	15.81	12	532,110,982	300.00	190.04			
5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	93	800,000,000	175.33	565,222,500	93	560,000,000	93	877,611,560	100	86,030,985	100	90,393,909	100	109,719,048	100	73,783,295	100	359,927,237	107.53	41.01	275.33	565,222,500	296.05	70.65			
5.01.03.2.01.		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang	Persen	93	800,000,000	190.91	565,222,500	93	560,000,000	93	877,611,560	100	86,030,985	100	90,393,909	100	109,719,048	100	73,783,295	100	359,927,237	107.53	41.01	290.91	565,222,500	312.81	70.65			

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																							16		
		Manusia	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																										
5.01.03.2.01.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	100,000,000	8	0	8	70,000,000	8	11,100,000	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	100,00	0,00	16	0	200,00	0,00	
5.01.03.2.01.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensil Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	100,000,000		0	8	70,000,000	8	0		0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
5.01.03.2.01.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	100,000,000	1	74,497,694	8	70,000,000	8	101,476,000	8	9,363,500	8	14,045,250	8	16,330,250	0	11,516,500	8	51,255,500	100,00	50,51	9	74,497,694	112,50	74,50	
5.01.03.2.01.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	100,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
5.01.03.2.01.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	100,000,000	8	146,663,245	8	70,000,000	8	328,245,040	1	50,412,618	1	25,934,500	8	43,531,204	0	26,784,915	8	146,663,237	100,00	44,68	16	146,663,245	200,00	146,66	
5.01.03.2.01.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensil Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	100,000,000		0	8	70,000,000	8	0		0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
5.01.03.2.01.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	100,000,000	24	26,558,707	8	70,000,000	8	17,250,000	8	0	8	0	8	2,940,000	0	327,000	8	3,267,000	100,00	18,94	32	26,558,707	400,00	26,66	
5.01.03.2.01.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	100,000,000	17	317,502,854	1	70,000,000	1	419,540,520	1	26,254,867	1	50,414,159	1	46,917,594	0	35,154,880	1	158,741,500	100,00	37,84	18	317,502,854	1,800,00	317,50	
5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	1,245,000,000	184.39	720,800,935	93	1,120,000,000	93	882,801,320	96	75,050,832	96	103,046,704	96	101,053,944	96	50,036,600	96	329,188,080	103.23	37.29	280.39	720,800,935	301.49	67.90	
5.01.03.2.02.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	93	600,000,000	194.83	282,703,605	93	560,000,000	93	459,387,270	100	44,663,450	100	41,296,254	100	34,881,444	100	10,262,000	100	131,103,148	107.53	28.54	294.83	282,703,605	317.02	47.12	
5.01.03.2.02.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	75,000,000	13	143,379,522	5	70,000,000	5	197,643,800	0	15,129,100	0	31,159,254	5	8,937,100	0	3,048,000	5	58,273,454	100,00	29,48	18	143,379,522	360,00	19117	
5.01.03.2.02.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensil Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	75,000,000		0	5	70,000,000	5	0		0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
5.01.03.2.02.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	75,000,000		0	5	70,000,000	5	0		0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
5.01.03.2.02.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	75,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
5.01.03.2.02.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	75,000,000	17	139,324,083	5	70,000,000	5	261,743,470	0	29,534,350	0	10,137,000	3	25,944,344	0	7,214,000	3	72,829,694	60,00	27,82	20	139,324,083	400,00	185,77	
5.01.03.2.02.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensil Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	75,000,000		0	5	70,000,000	5	0		0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
5.01.03.2.02.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	75,000,000		0	5	70,000,000	5	0		0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
5.01.03.2.02.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	75,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
5.01.03.2.03.		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	645,000,000	172.97	438,097,330	93	560,000,000	93	423,414,050	100	30,387,382	100	61,750,450	100	66,172,500	100	39,774,600	100	198,084,932	107.53	46.78	272.97	438,097,330	293.52	67.92	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16		
5.01.03.2.03.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	75,000,000	4	46,777,600	3	70,000,000	3	44,891,000	0	6,302,000	0	9,453,000	3	9,453,000	0	6,302,000	3	31,510,000	100.00	70.19	7	46,777,600	233.33	62.37			
5.01.03.2.03.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75,000,000		0	3	70,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00			
5.01.03.2.03.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75,000,000	0	0	3	70,000,000	3	71,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00			
5.01.03.2.03.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75,000,000	5	391,319,730	3	70,000,000	3	306,623,050	0	24,085,382	0	52,297,450	0	56,719,500	3	33,472,600	3	166,574,932	100.00	54.33	8	391,319,730	266.67	521.76			
5.01.03.2.03.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	75,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00			
5.01.03.2.03.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	75,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00			
5.01.03.2.03.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	75,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00			
5.01.03.2.03.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	120,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00			
5.05.		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																													
5.05.02.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Nilai		55.00	400,000,000	86.15	300,416,498	55.00	350,000,000	55.00	341,680,710	37.1	4,577,500	37.1	26,851,980	37.1	36,962,900	45.1	65,166,100	45	133,558,480	82.00	39.09	131.25	300,416,498	238.64	75.10		
5.05.02.2.04.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	400,000,000	187.23	300,416,498	100	350,000,000	100	341,680,710	0	4,577,500	40	26,851,980	45	36,962,900	100	65,166,100	100	133,558,480	100.00	39.09	287.23	300,416,498	287.23	75.10			
5.05.02.2.04.01.		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	150,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00			
5.05.02.2.04.03.		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	250,000,000	2	300,416,498	1	280,000,000	1	341,680,710	0	4,577,500	0	26,851,980	0	36,962,900	1	65,166,100	1	133,558,480	100.00	39.09	3	300,416,498	300.00	120.17			
5.05.02.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	25	375,000,000	25	207,805,426	25	460,000,000	25	377,041,020	25	21,110,469	25	7,770,000	25	115,004,300	25	61,280,657	25	205,165,426	100.00	54.41	50	207,805,426	200.00	55.41			
5.05.02.2.01.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	Persen	100	25,000,000	100	207,805,426	100	50,000,000	100	377,041,020	20	21,110,469	25	7,770,000	100	115,004,300	100	61,280,657	100	205,165,426	100.00	54.41	200	207,805,426	200.00	831.22			
5.05.02.2.01.12.		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	25,000,000	1	207,805,426	1	50,000,000	1	377,041,020	0	2110,469	0	7,770,000	0	115,004,300	1	61,280,657	1	205,165,426	100.00	54.41	2	207,805,426	200.00	831.22			
5.05.02.2.02.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persen	100	150,000,000		0	100	150,000,000	100	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00			
5.05.02.2.02.03.		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00			
5.05.02.2.02.05.		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00			
5.05.02.2.02.09.		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00			
5.05.02.2.03.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100	200,000,000		0	100	260,000,000	100	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00			
5.05.02.2.03.01.		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	Dokumen	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00			
5.05.02.2.03.02.		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	100,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00			

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan				
						5		6		7				8		9		10			11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100			14=6+12		15=14/5x100	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	k	Rp
1	2	3	4	4A																									16		
5.05.022.03.04.		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	50,000,000	0	1	70,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
5.05.022.03.05.		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	0	0	0	0	70,000,000	0	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				